



# Babak Baru Formula E: Upaya Jegal Anies Nyapres

FAKTA SPESIAL  
 FORMULA E  
 JAKARTA

- 1. Commitment Feenya Dinilai Lebih Mahal**  
Biaya Commitment Fee Formula E dinilai lebih tinggi dari negara lain sehingga KPK perlu melakukan pemeriksaan dugaan korupsi di ajang ini.
- 2. Ajang Formula E Digelar Tanpa Perencanaan**  
Lokasi yang berpindah-pindah membuat banyak kelangan menduga ajang ini digelar tanpa perencanaan yang matang.
- 3. Sirkuit dengan Pengerjaan Tercepat**  
Sirkuit ini dibangun dalam waktu kurang dari 57 hari saja.
- 4. Memiliki Desain Kuda Lumpung**  
Sirkuit JEC memiliki desain seperti Kuda Lumpung, sebuah kesenian tradisional dari Ponorogo.
- 5. Sirkuit Standar Internasional**  
Meski dibangun dalam waktu singkat, JEC memenuhi standar homologasi FIA dengan Grade 3.
- 6. Telan Biaya Besar Tanpa Sponsor BUMN**  
Pantia Formula E Jakarta mengungkapkan biaya pelaksanaan mencapai Rp120 miliar sampai Rp130 miliar, namun tak ada BUMN jadi sponsor.
- 7. Calo Tiket Berkeliaran**  
Calo tiket Formula E berkeliaran sehingga polisi harus turun tangan untuk mengamankan para calo.
- 8. Pemenang Lomba tak Menyempotkan Sampahnya**  
Jika biasanya di ajang balap, pemenang menyempotkan sampahnya sebagai tanda kemenangan di ajang Formula E Jakarta tak ada perayaan dengan sampahnya.

## B: Pengamat Sebut Ada Potensi Jadi Tersangka

**INDOPOS.CO** - Kasus dugaan dugaan korupsi di ajang Formula E kembali mencuat jelang berakhirnya masa jabatan Gubernur DKI Anies Baswedan. Sang gubernur pun sudah memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (7/9/2022).

Ketua KPK Firi Bahuri menjelaskan bahwa pemeriksaan Anies hanya sekadar dimintai keterangan dalam rangka membuat kasus ini jadi terang benderang. Anies pun tak dipertanyakan khusus seperti juga saksi - saksi lain dalam kasus lain. "Sebagaimana peraturan perundang-undangan, yang bersangkutan diperiksa untuk mengetahui apa yang dilihat, didengar ataupun diketahui terkait permasalahan Formula E," ujar Firi dalam keterangan persnya, Rabu (7/9/2022).

Sementara Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut Anies diklarifikasi terkait inisiasi, penganggaran hingga commitment fee gelaran Formula E. "Pak Anies dimintai klarifikasi terkait inisiasi, perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan Formula E, termasuk pembayaran commitment fee," kata Alex.

Alex menegaskan kasus dugaan korupsi di penyelenggaraan Formula E Jakarta itu masih dalam status penyelidikan dan belum masuk ranah penyidikan.

Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menyatakan karena masih dalam tahap penyelidikan, maka terkait materi permintaan keterangan tersebut tak bisa disampaikan kepada publik. Sebab internal KPK sendiri masih mencari alat bukti hingga ditemukan lebih dari dua alat bukti, baik berupa dokumen maupun keterangan sejumlah pihak terkait gelaran event tersebut. "Prinsipnya, permintaan keterangan dimaksud sebagai kebutuhan proses penyelidikan yang sedang dilakukan KPK," ucap Fikri.

Sedangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sempat diperiksa KPK selama 11 jam menyatakan panggilan dirinya adalah upaya untuk menghilangkan prasangka dan kecurigaan terhadap Formula E.

"Ini untuk menghilangkan prasangka dan kecurigaan yang tidak pada tempatnya. Sehingga di masa mendatang para pemimpin pusat maupun daerah akan mampu dan mendapat tempat mengungkap berbagai kemajuan yang membawa perubahan di Indonesia," kata Anies seperti dikutip Antara, Rabu (7/9/2022).

Lebih lanjut Anies menyebutkan bahwa dirinya datang ke lembaga anti rasuah itu untuk memberikan keterangan terkait penyelenggaraan Formula E Jakarta, sekaligus demi membaurkan kemajuan dan gagasan soal ajang balap mobil listrik itu sehingga kecurigaan hilang menjadi kolaborasi. "Ini adalah upaya membaurkan kemajuan dan gagasan soal formula E, agar KPK dapat mendudukkannya dalam sistem hukum dan pertanggungjawaban sebuah kebijakan," kata Anies.

Anies mengatakan sejak awal, Formula E adalah sebuah bentuk kemajuan berupa gagasan dan kegiatan, serta merupakan kemajuan yang harus dibaurkan dengan sistem hukum, kebijakan dan politik di Indonesia. "Sebuah ide kemajuan yang harus dibaurkan dengan sistem hukum, kebijakan dan bahkan politik di Indonesia. Makin memburu sebuah kemajuan maka narasi peradaban kita makin akan terus bergerak ke arah yang benar," ucap Anies.

### Berpotensi Jadi Tersangka

Sementara Koordinator Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara) Petrus Selestinus, menyatakan pemanggilan Anies dalam kasus korupsi ini menyebabkan yang bersangkutan bisa menjadi tersangka.

"Pemanggilan Anies Baswedan menjadi saksi bahkan saksi kunci, bisa berpotensi menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka manakala terdapat kerugian negara, karena kedudukan Anies juga sebagai kepala pemerintah daerah yang menerima kepercayaan dari Presiden untuk mengelola APBD berdasarkan Perda (peraturan daerah) APBD DKI Jakarta, sehingga di sinilah letak keterlibatan Anies Baswedan," tandas Petrus kepada indoposco, Kamis (8/9/2022).



# Babak Baru Formula E: Upaya Jegal Anies Nyapres

"Dengan dipanggilnya Anies Baswedan sebagai saksi oleh KPK untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi anggaran pembangunan sirkuit Formula E di Ancol, maka terhadap penggunaan anggaran untuk Formula E di Ancol diduga terjadi tindak pidana korupsi, sehingga di tahap penyelidikan inilah KPK berusaha untuk memastikan apakah telah ada peristiwa pidana korupsi," ujarnya.

Petrus mengatakan penanganan kasus Formula E oleh KPK tentu didasarkan petunjuk dan alat bukti didasari oleh penyelidikan. "Meskipun kita meyakini bahwa KPK sudah memiliki alat bukti dugaan korupsi dalam pembangunan sirkuit Formula E, namun KPK masih membutuhkan tambahan alat bukti dan/atau barang bukti lain sebelum tiba kepada tahapan apakah dinaikkan statusnya ke penyidikan guna menemukan siapa tersangka pelakunya," ungkap Petrus.

Menurut Petrus, KPK memanggil Anies Baswedan untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena KPK menemukan adanya bukti atau petunjuk tentang keterlibatan Anies Baswedan dalam kedudukannya sebagai pengelola APBD dan pengguna anggaran.

Karena itu bisa saja pascapemeriksaan Anies, KPK akan menaikkan status pemeriksaan menjadi penyidikan dengan menetapkan sejumlah orang menjadi tersangka sepanjang didukung dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti. Jika demikian maka potensial Anies Baswedan menjadi tersangka. Sebaliknya jika tidak didukung alat bukti, maka KPK bisa saja menghentikan penyelidikan kasus ini di tahap penyelidikan," ujarnya.

## Upaya Jegal Anies

Lebih jauh Petrus mengatakan pemeriksaan dalam kasus dugaan korupsi Formula E ini, secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh kepada proses pencalonan Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden (capres) 2024, karena bagaimanapun dukungan publik kepada setiap capres disertai dengan catatan harus bersih dari rekam jejak korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

"KPK bisa saja dicurigai sebagai alat kepentingan politik dalam memeriksa Anies Baswedan, karena melakukan pemeriksaan di tengah Anies berada dalam elektabilitas capres 2024 posisi 3 besar, karena itu dikaitkan dengan pencapresan apalagi sebagai by design untuk menjegal Anies Baswedan tak terhindarkan lagi," katanya.

Karena itu, kata Petrus, KPK harus berhati-hati dan lebih baik secara intensif memeriksa Anies Baswedan sebanyak mungkin agar bisa memastikan peran keterlibatan dan pertanggungjawabannya sampai di mana, agar KPK tidak dicurigai sebagai alat untuk memukul lawan politik.

"Lawan politik Anies Baswedan saya kira biasa-biasa saja melihat Anies Baswedan dipanggil KPK, karena Anies maju atau tidak tergantung kepada masyarakat memilih dan kepada partai politik yang mengusungnya. Bahwa nanti kasus ini berdampak kepada persoalan elektabilitas dan elektoral, dipastikan iya dan itu berdampak memberikan keuntungan politik bagi pesaingnya, karena dengan sendirinya rakyat akan berpaling dari Anies Baswedan," tutup Petrus.

Di sisi lain, Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin menyatakan, meskipun diperiksa KPK tingkat elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih belum dapat dikalkulasikan.

"Kalau Anies tidak bersalah, tidak korupsi. Justru akan menguntungkan Anies. Karena dianggap "dizalimi" kasus pemeriksaan secara politik. Tapi, kalau bersalah itu yang repot," kata Ujang saat dihubungi Indopos.com melalui gawai, Jakarta, Kamis (8/9/2022).

Ia berpandangan, setiap orang yang diperiksa untuk klarifikasi suatu persoalan di lembaga antirasuah belum tentu dibalang bersalah. Apalagi perkaranya belum naik ke tahap penyidikan. "Saya melihat semua pihak yang diperiksa KPK belum tentu bersalah, yang repot ketika diframing siapa pun yang diperiksa KPK bersalah," ujar Ujang.

Proses hukum tersebut kewenangan KPK, sisi profesionalitas dan objektif penyidik menentukan hasil akhirnya. Paling penting tidak ada intervensi dari pihak mana pun. Termasuk kuasa politik.

"Tergantung ke depan, apakah KPK mengusut itu profesional sesuai dengan koridor hukum atau melalui jalur politik. Kalau jalan politik kan bermacam-macam, orang yang tidak bersalah pun akan dicari-cari kesalahannya seolah bersalah," ucap Ujang.

"Tapi, kalau koridor hukum kalau tidak bersalah ya sudah. Saya melihat apakah elektabilitas Anies turun atau tidak tergantung ke depan Sementara tingkat keterpilihan publik bakal tinggi bila Anies diputuskan tidak bersalah. Kalau Anies tidak bersalah, tidak terlibat Formula E soal pendanaannya justru makin elektabilitasnya akan bagus. Tapi kalau dianggap bersalah ini akan menurunkan," ucap Ujang.

Ia menyadari, bahwa ada pihak yang berusaha menjegal Anies dalam kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. "Ada pihak memang ingin menggagalkan Anies bisa nyapres. Lihat saja nanti apakah memang benar tuduhan-tuduhan itu," imbuhnya.

Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies (KoReAn) Muhammad Ramli Rahim melalui gawai, Kamis (8/9/2022) mengatakan, formula E merupakan event yang sukses luar biasa dan mengharumkan nama Indonesia di kancah Internasional.

"Lalu kenapa? Formula E terus dipersoalkan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyatakan penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E Jakarta layak untuk dilaksanakan," katanya sambil berharap, KPK tidak menjadi alat politik bagi penguasa dan oligarki.

"Kita perlu mengingatkan pertama yang berkuasa jangan menghalalkan segala cara untuk menguasai negara ini melalui cara-cara yang busuk, yang kotor. Menggunakan kekuasaan, menggunakan lembaga tinggi negara KPK untuk meraih kekuasaan. Saya kira ini harus dihentikan," imbuhnya.

Bahkan, kata Ramli, Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto pun bicara dugaan politisasi dan permufakatan jahat untuk mengkriminalisasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di balik pengusutan dugaan korupsi di penyelenggaraan Formula E oleh KPK.

"Alhamdulillah, setelah menjalani 11 Jam pemeriksaan KPK, Anies Baswedan malah merasa senang. Anies senang membantu KPK memperjelas segala hal yang masih belum jelas bagi KPK terkait Formula E. Apakah itu semua juga bagian dari alat politik penguasa dan oligarki? Bagi kami Relawan Anies, semuanya kami serahkan kepada Allah SWT," imbuhnya.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta August Hamonangan berpendapat, pemanggilan Anies dalam penyelenggaraan ajang Formula E tidak ada kaitannya dengan urusan kepentingan politiknya. "Nggak ada, kan sebelumnya sudah diperiksa ketua DPRD DKI Jakarta dan Wakil Ketua Komisi E juga diperiksa," kata August.

Apalagi tim penyelidik KPK telah memeriksa sejumlah orang dimintai keterangan soal dugaan korupsi di ajang balapan mobil listrik bertaraf internasional. Antara lain, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dan Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Anggara Wicitra Sastroamidjojo. Pemeriksaan itu untuk mengumpulkan data dan keterangan informasi yang diperlukan penyidik.

"Kewajiban sebagai warga negara bahkan pejabat gubernur, sekalipun memang harus tunduk kepada hukum. Tentunya Anies dipanggil KPK sudah mempunyai alasan hukum yang kuat guna membuktikan dalam penyelidikan bahwa ada unsur-unsur tindak pidana korupsi," tutur August.

Anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra Syarif menilai, pemanggilan Anies perihal penyelenggaraan Formula E merupakan hal biasa untuk melengkapi proses hukum yang tengah diselidiki KPK. "Pemanggilan Anies itu bagus, dia siap untuk mencari, memberikan informasi sedetail kebutuhan KPK. Saya berpandangan bagus itu," ucap Syarif.

## Jangan Hakimi Anies

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta penegakan hukum harus dilakukan transparan dan adil. Proses pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jangan dipolitisasi.

"Jika ada politisasi dalam pemanggilan Anies Baswedan, ini bisa membuat masyarakat marah," kata Mardani Ali Sera melalui gawai, Kamis (8/9/2022).

Ia menjelaskan, sudah banyak pendapat yang menyebutkan bahwa proyek sejenis diaudit dan diperiksa. Apalagi Anies memenuhi kewajiban datang ke KPK, sebagai wujud memberantasan korupsi.

"Anies contoh teladan bagaimana warga yang baik memenuhi kewajiban memberantas korupsi," ujarnya.

Apalagi, lanjut dia, penjelasan Anies, pasca pemeriksaan di KPK semakin membuat publik suka. Secara transparan, Anies menyebut puas menjelaskan semuanya. "Penjelasan sesudah pemeriksaan kian membuat publik jatuh cinta dengan Mas Anies," ucapnya.

Sedangkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Johnny G Plate meminta semua pihak tidak mendahului proses hukum yang tengah berjalan dan tidak menghakimi Anies Baswedan. Sebab, benar dan salah seseorang merupakan wilayah pro justitia atau keadilan dalam proses penegakan hukum. "Kita tidak bisa mendahului proses hukum. Nanti kita mengadili orang, salah dan benar kita belum tahu," ungkapnya.

Kedatangan Anies Baswedan memenuhi panggilan KPK, menurut dia, patut diapresiasi. Sebab, sikap tersebut dinilai baik bagi publik. "Sikap Anies telah menunjukkan sikap sebagai warga negara yang baik, karena itu kewajiban warga negara taat pada hukum. Tidak sedikit warga negara justru tidak mengindahkan proses hukum dengan cara mangkir dari panggilan KPK," imbuhnya. (dam/dan/nas)